



<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ferry Santoso

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel independen adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, pertemuan dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, pertemuan komite audit, konsentrasi kepemilikan. Populasinya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 yaitu sebanyak 151 perusahaan. Sampel adalah 33 perusahaan manufaktur. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan hanya proporsi komisaris independen yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Walaupun secara signifikan berpengaruh, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: *corporate governance*, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the effect of corporate governance characteristics on corporate social responsibility in manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange. The dependent variable is corporate social responsibility, whereas independent variables are board size, proportion of independent board, board meeting, proportion of independent audit committee, audit committee meeting, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, government ownership. The population is 151 manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) on 2008. The sample is 33 manufacturing companies. To examine the effect of independent variables on dependent variable, multiple regression analysis is used. The result shows that only proportion of independent board has significant influence. Though the result is significant, proportion independent board has negative effects to the corporate social responsibility.

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, company size, profitability.

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sahid
Jakarta
ferry.santktt@gmail.com

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai organisasi yang hidup di tengah lingkungannya berinteraksi dengan banyak pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan diantaranya adalah masyarakat, tenaga kerja, lingkungan, pemegang saham, dan *stakeholder* yang lain (Said, *et al.*, 2009). Mirfazli (2008) mengungkapkan bahwa untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan *stakeholder*, perusahaan melakukan dan melaporkan serangkaian aktivitas sosial. *Stakeholder* akan mendapatkan pemahaman seberapa besar tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap *stakeholder* dengan mengungkapkan semua aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Lebih jauh, Said, *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai berbagai keuntungan di antaranya meningkatkan kinerja keuangan, mempertinggi citra produk, hingga kontribusi terhadap nilai pasar perusahaan.

Walaupun diungkapkan secara teoritis bahwa CSR memberikan keuntungan bagi perusahaan, penelitian CSR yang sudah ada membuktikan sebaliknya. Said, *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa kesadaran perusahaan Malaysia untuk melakukan pengungkapan CSR masih rendah. Hasil yang tak jauh berbeda juga ditemukan di Indonesia. Mirfazli (2008) mengevaluasi pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan berbagai kelompok industri yang terdaftar di *Jakarta Stock Exchange* (JSX) dengan mengklasifikasikan perusahaan yang terdaftar di JSX menjadi perusahaan *high profile* dan *low profile*. Hasil penelitian Mirfazli (2008) menunjukkan rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih rendah baik untuk perusahaan *high profile* (16.17 persen) dan perusahaan *low profile* (9.64 persen). Sembiring (2005) juga menemukan bahwa rata-rata pengungkapan CSR perusahaan *go public* yang terbanyak dilakukan oleh sektor perbankan sebesar 6,41 persen dan terendah dilakukan oleh sektor *paper and allied product* sebesar 0,28 persen.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bab V pasal 74. Walaupun demikian, pasal tersebut hanya mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, seperti yang dinyatakan dalam ayat (1) yang berbunyi: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."

Pelaksanaan tanggung jawab sosial juga diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 15 ayat (b) dalam UU No. 25 tahun 2007 mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun tidak diatur secara jelas, perundang-undangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan *stakeholder*, pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) merupakan kunci penting yang menjadi faktor penentu bagi ketersediaan informasi perusahaan bagi *stakeholder*. Seperti halnya dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial, penerapan prinsip *corporate governance* di Indonesia diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. UU No. 40 tahun 2007 menguraikan dengan jelas peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh perseroan terbatas di Indonesia dalam rangka

pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Sedangkan UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat (a) mengatur kewajiban penanam modal untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka menegakkan prinsip *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka salah satu keputusan yang harus dibuat oleh manajemen adalah tingkat pengungkapan informasi dan transparansi (Rachmawati, 2009).

KNKG (2006) menjelaskan bahwa pedoman pokok pelaksanaan yang harus dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah transparansi (*transparency*). Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan haknya.

Said, *et al.* (2009) mengungkapkan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antara perusahaan dengan *stakeholder* adalah melaporkan aktivitas perusahaan, yang salah satunya mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan. Serupa dengan Said, *et al.* (2009), Sembiring (2005) juga menjelaskan bahwa salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk mengetahui gambaran kondisi sebuah perusahaan, dibutuhkan informasi yang akurat dan tepat atas perusahaan tersebut. Informasi tentang perusahaan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Informasi baik (*good news*) akan memberikan gambaran kondisi perusahaan perusahaan yang baik, dan sebaliknya informasi yang buruk (*bad news*) akan memberikan gambaran kondisi perusahaan yang buruk bagi penerima informasi.

Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar di antaranya melalui pengungkapan dalam laporan tahunan hingga pembuatan *web site* perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2006). Perusahaan mengungkapkan informasi kepada pihak luar dengan harapan pihak luar mengetahui kondisi perusahaan terutama informasi yang menggambarkan kondisi baik perusahaan. Rahayu (2006) mengungkapkan bahwa laporan tahunan dan laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak di luar manajemen, mengetahui kondisi perusahaan. Selama ini, kinerja yang dilakukan manajer hanya untuk memajukan kepentingan finansial perusahaan dengan cara mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Padahal di sisi lain, aktivitas perusahaan secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap lingkungan.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, struktur komite audit, aktivitas komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan 79 indikator pengungkapan kinerja sosial yang dimuat dalam pedoman *Global Reporting Initiative/GRI* (2002). Indikator tersebut terbagi dalam tiga bagian yaitu ekonomi (1 dimensi dan 3 aspek), lingkungan (1 dimensi dan 8 aspek), dan sosial (4 dimensi dan 22 aspek). Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva, sedangkan profitabilitas diproksikan dengan *return on equity* (ROE) dan *return on assets* (ROA).

Penelitian ini mengontrol kedua variabel ini dengan tujuan untuk meningkatkan penjelasan hubungan *corporate governance* dan tingkat pengungkapan CSR (Said, *et al.*, 2009).

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Agensi). *Agency theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, di mana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama (Arifin, 2005). Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Dalam konsep *agency theory*, manajemen sebagai agen seharusnya bekerja untuk kepentingan terbaik pemegang saham, akan tetapi dalam praktiknya, manajemen akan melakukan cara untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Asimetri informasi merupakan kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang tidak diketahui pihak lain. Beberapa akibat tertentu hanya akan diketahui oleh suatu pihak tanpa diketahui pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. Asimetri informasi dalam perusahaan muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Komalasari, 2000). Dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) baik informasi akuntansi maupun informasi non akuntansi.

Asumsi dalam *agency theory* diinterpretasikan dalam *corporate governance*, dan telah dirumuskan dalam beberapa dekade, yang kini telah menghasilkan sebagian besar rangkaian teknik dan praktik universal yang didesain untuk mengawasi eksekutif baik dalam maupun luar perusahaan (Roberts, 2004).

Chariri (2008) mengungkapkan bahwa kebanyakan penelitian pengungkapan social dan lingkungan yang selama ini berkembang didominasi oleh *economic-based theory* yang berpijak pada *agency theory*. Dalam perspektif ini, *economic-based theory* selalu didasarkan bahwa individu bersifat *self-interest* dan rasional, sehingga cenderung berperilaku sebagai *profit maximiser*. Hal senada diungkapkan Sembiring (2005) bahwa teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Legitimacy Theory (Teori Legitimasi). *Legitimacy theory* diperoleh dari konsep legitimasi organisasional yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Guthrie dan Ward (2006) sebagai: "... sebuah kondisi atau status yang terjadi ketika sebuah sistem nilai entitas selaras dengan system nilai dari distem social yang lebih besar dimana entitas tersebut berada. Ketika sebuah perbedaan, aktual atau potensial, terjadi antara dua system nilai, terdapat ancaman bagi legitimasi entitas."

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan akan berupaya untuk memastikan bahwa organisasi telah beroperasi dalam batasan dan norma masing-masing masyarakat (Guthrie & Ward, 2006). Dowling & Pfeffer (1975) dalam Chariri (2008) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku

organisasi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi organisasional memprediksikan bahwa perusahaan akan melakukan apapun yang dianggap penting untuk mempertahankan kesan baik dari sebuah legitimasi bisnis dengan tujuan legitimasi dan metode untuk memperolehnya (Villiers & Staden, 2006).

Milne (2002) mengungkapkan bahwa sejumlah penelitian empiris yang ada menunjukkan bahwa *legitimacy theory* merupakan teori yang paling sesuai untuk menjelaskan motif pengungkapan sosial. Hal ini didukung oleh hasil yang *robust* atas hubungan ukuran dan pengungkapan sosial. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Branco & Redrigues (2006) yang menyatakan bahwa dalam konteks legitimasi teori, perusahaan dalam beberapa industri secara sosial lebih nyata dan lebih dicermati oleh publik. Perusahaan mendapatkan tekanan sosial dan politik untuk bertindak dalam aktivitas sosial yang lebih dan untuk menyediakan informasi dalam area tertentu dari tanggung jawab sosial dan cenderung mengungkapkan hal tersebut. Perusahaan dalam industri dengan dampak lingkungan potensial yang lebih besar cenderung menyediakan informasi lingkungan berkaitan dengan alasan legitimasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Said, *et al.* (2009) mengutip definisi tanggung jawab sosial perusahaan dari Bursa Malaysia yang mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai praktik bisnis terbuka dan transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan peduli terhadap masyarakat, tenaga kerja, lingkungan, pemegang saham, dan stakeholder yang lain. Iryanie (2009) mengungkapkan bahwa penerapan CSR oleh suatu perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas yang nantinya akan diaplikasikan melalui strategi perusahaan, apakah berorientasi *stakeholder* atau berorientasi *shareholder*.

Dalam akuntansi konvensional, fokus perhatian perusahaan hanya tertuju pada kepentingan pemegang saham, sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Namun, saat ini tuntutan publik terhadap perusahaan semakin besar, perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan pemegang saham, tetapi juga kepentingan karyawan, konsumen, serta masyarakat. Sembiring (2005) menyatakan bahwa tekanan dari berbagai pihak muncul terhadap sektor swasta untuk menerima tanggung jawab dampak pengaruh aktivitas bisnis terhadap masyarakat. Lebih lanjut, Sembiring (2005) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Tanggung Jawab Sosial di Indonesia. Budiarta (2008) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial tidak semata-mata hanya bertanggung jawab bagi pemerintah itu sendiri, namun sektor swasta khususnya entitas bisnis juga diharapkan untuk memperhatikan masalah-masalah sosial. Sebagai bukti dari tanggapan terhadap masalah-masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU No. 25 tahun 2007 mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (b). Serupa dengan UU No. 25 tahun 2007, pasal 74 dari UU No. 40 tahun 2007 juga menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya dari sumber daya alam harus mempunyai tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dinyatakan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, aktivitas (pertemuan) dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Data sekunder yang digunakan meliputi laporan tahunan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 2008 dan *sustainability report* yang dipublikasikan perusahaan. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gambaran mengenai sampel penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Deskripsi Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008	151
Perusahaan manufaktur yang laporan tahunan tahun 2008 tidak dapat diakses	-94
Perusahaan manufaktur yang laporan tahunan tahun 2008 dapat diakses	57
Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria sampel:	
- Perusahaan yang tidak mempublikasikan data lengkap berkaitan dengan pertemuan dewan komisaris dan pertemuan komite audit	-23
- Perusahaan yang menganut <i>one board system</i> dalam pelaksanaan <i>corporate governance</i>	-1
Jumlah sampel	33

Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Persamaan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

$$CSDI = a + b_1 \text{ BOARD_SIZE} + b_2 \text{ BOARD_INDEPENDENT} + b_3 \text{ BOARD_MEETING} + b_4 \text{ AUD_COM_INDEPENDENT} + b_5 \text{ AUD_COM_MEETING} + b_6 \text{ OWN_CONCENT} + b_7 \text{ MANAG_OWN} + b_8 \text{ FOREIGN_OWN} + b_9 \text{ GOVERN_OWN} + b_{10} \text{ TA} + b_{11} \text{ ROE} + b_{12} \text{ ROA} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

BOARD_SIZE	= Ukuran dewan komisaris
BOARD_INDEPENDENT	= Proporsi komisaris independen
BOARD_MEETING	= Pertemuan Dewan komisaris
AUD_COM_INDEPENDENT	= Proporsi anggota independen komite audit
AUD_COM_MEETING	= Pertemuan komite audit
OWN_CONCENT	= Konsentrasi kepemilikan
MANAG_OWN	= Kepemilikan Manajerial
FOREIGN_OWN	= Kepemilikan asing
GOVERN_OWN	= Kepemilikan Pemerintah
TA	= Total Aktiva
ROE	= <i>Return on Equity</i>
ROA	= <i>Return on Assets</i>
ε	= error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Disclosure Index	33	0.03	0.34	0.1488	0.07386
Ukuran Dewan Komisaris	33	2	9	4.79	1.980
Independensi Dewan Komisaris	33	0.3333	0.5556	0.396	0.0717
Pertemuan Dewan Komisaris	33	2	17	5.55	3.364
Independensi Komite Audit	33	0.1111	0.5000	0.24446	0.095
Pertemuan Komite Audit	33	2	18	7	3.976
Konsentrasi Kepemilikan	33	0.09940	0.95880	0.5374	0.2369
Kepemilikan Manajerial	33	0.000	0.699	0.0264	0.122
Kepemilikan Asing	33	0.000	0.8774	0.2588	0.279
Kepemilikan Pemerintah	33	0.000	0.516	0.0175	0.0901
Ukuran Perusahaan	33	96.879.613	13.949	12.296	0.708
ROA	33	-0.121	0.339	0.077	0.0909
ROE	33	-0.808	0.646	0.1365	0.2336
Valid N (listwise)	33				

Tabel 1 menunjukkan masih rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI) yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 14,88 persen. Hasil ini menunjukkan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya mengungkapkan 12 item dari 79 item tingkat pengungkapan sosial yang dijadikan indikator dalam penelitian

ini. Rata-rata perusahaan sampel memiliki 5-6 anggota dewan komisaris dengan proporsi komisaris independen 39,6 persen dari jumlah komisaris, dan rata-rata mengadakan pertemuan 5-6 kali dalam 1 tahun. Dari dekriptif statistik diatas, diketahui bahwa komisaris independen yang juga menduduki jabatan sebagai komite audit rata-rata sebanyak 24,46 persen dan komite audit melakukan pertemuan rata-rata 6 kali dalam 1 tahun. Rata-rata kepemilikan perusahaan memiliki konsentrasi kepemilikan 53,74 persen yang artinya terdapat kepentingan pemegang saham mayoritas yang cukup besar dalam struktur kepemilikan perusahaan sampel. Diantara data kepemilikan yang diteliti dalam penelitian ini, rata-rata terbesar adalah kepemilikan asing sebesar 25,88 persen, dilanjutkan dengan kepemilikan manajerial dengan rata-rata 2,64 persen dan kepemilikan pemerintah 1,75 persen. Ukuran perusahaan sampel bervariasi yang tercermin dari nilai logaritma *total asset* dengan standar deviasi 70,8 persen dan nilai rata-rata 12.296. Tidak semua perusahaan sampel dalam kondisi laba, yang ditunjukkan dengan nilai minimum ROA -12,1 persen dan ROE -80,8 persen, tetapi secara rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat profitabilitas positif dengan nilai rata-rata ROA sebesar 9,09 persen dan ROE sebesar 23,36 persen.

Uji Signifikansi (Uji F). Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai dari uji F atas variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel ANOVA (*analysis of variance*) sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Signifikansi F

		ANOVA (b)				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,41	12	0,451	3,129	0,012 (a)
	Residual	2,882	20	0,144		
	Total	8,291	32			

a. Predictors: (Constant), ROE, INDEP_COM, MANAGERIAL_OWN, OWN_CONCENT, COM_MEETING, INDEP_AUDIT_COM, GOVERN_OWN, FOREIGN_OWN, log_TOTAL_ASSET, AUDIT_COM_MEETING, ROA, COM_SIZE

b. Dependent Variable: CSDI

Hasil uji signifikansi F atas pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris (COM_SIZE), independensi dewan komisaris (INDEP_COM), pertemuan dewan komisaris (COM_MEETING), independensi komite audit (INDEP_AUDIT_COM), pertemuan komite audit (AUDIT_COM_MEETING), konsentrasi kepemilikan (OWN_CONCENT), kepemilikan manajerial (MANAGERIAL_OWN), kepemilikan asing (FOREIGN_OWN), kepemilikan pemerintah (GOVERN_OWN) serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (log_TOT_ASSET), ROA, dan ROE terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,129 dan tingkat signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5 persen menunjukkan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI).

Koefisien Determinasi (Goodness of Fit Test). Koefisien determinasi untuk model regresi yang diuji dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,808(a)	0,652	0,444	0,379573772

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk model regresi adalah sebesar 0,444. Hal ini berarti 44,4 persen variasi variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini. Chariri (2008) mengungkapkan terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di antaranya *decision-usefulness theory*, *economic based theory (positive accounting theory)*, dan *political economy theory (legitimacy dan stakeholder theory)*. Berbagai teori tersebut menyebabkan banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji t. Uji t dilakukan untuk menguji seberapa besar variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji t dalam model analisis regresi berganda untuk variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Uji Signifikansi Model Parameter Individual

Model		Coefficient (a)		Beta	t	Sig.
		Unstandardized	Standardized			
		Coefficients	Coefficients			
	B	Std. Error				
1	(Constant)	5,061	4,312		1,174	0,254
	COM_SIZE	-1,361	0,659	-0,658	-2,065	0,052**
	INDEP_COM	-1,159	0,505	-0,394	-2,294	0,033*
	COM_MEETING	-0,054	0,156	-0,056	-0,347	0,732
	INDEP_AUDIT_COM	0,979	1,16	0,294	0,844	0,409
	AUDIT_COM_MEETING	-0,3	0,15	-0,322	-2,002	0,059**
	OWN_CONCENT	0,165	0,145	0,19	1,14	0,268
	MANAGERIAL_OWN	0,01	0,023	0,076	0,441	0,664
	FOREIGN_OWN	0	0,067	0	-0,006	0,995
	GOVERN_OWN	-0,169	0,165	-0,164	-1,022	0,319
	log_TOTAL_ASSET	-0,56	1,694	-0,066	-0,331	0,744
	ROA	0,215	0,361	0,214	0,596	0,558
	ROE	0,079	0,325	0,089	0,243	0,811

* tingkat signifikansi 5%

**tingkat signifikansi 10%

Persamaan regresi yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan tabel di atas adalah:

$$\text{CSDI} = 5,061 - 1,361 \text{ COM_SIZE} - 1,159 \text{ INDEP_COM} - 0,054 \text{ COM_MEETING} + 0,979 \text{ INDEP_AUDIT_COM} - 0,300 \text{ AUDIT_COM_MEETING} + 0,165 \text{ OWN_CONCENT} + 0,010 \text{ MANAGERIAL_OWN} + 0,000 \text{ FOREIGN_OWN} - 0,169 \text{ GOVERN_OWN} - 0,560 \text{ log_TOTAL_ASSET} + 0,215 \text{ ROA} - 0,079 \text{ ROE}$$

Hasil uji signifikansi t menunjukkan proporsi komisaris independen yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tingkat signifikansi 5 persen dan variabel ukuran dewan komisaris serta aktivitas (pertemuan) komite audit yang secara signifikan berpengaruh pada tingkat signifikansi 10 persen. Variabel komisaris independen memiliki tingkat signifikansi 0,033 dan variabel ukuran dewan komisaris dan aktivitas komite audit memiliki tingkat signifikansi 0,052 dan 0,059.

Walaupun pengujian menunjukkan hasil yang signifikan, pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan aktivitas (pertemuan) komite audit terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki koefisien negatif. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel tersebut (yang mengindikasikan semakin kuat *corporate governance*) justru berpengaruh terhadap menurunnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSDI).

KESIMPULAN

Dari semua variabel yang diteliti, hanya variabel proporsi komisaris independen yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada tingkat signifikansi 5 persen. Walaupun secara signifikan berpengaruh, variabel proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Karakteristik *corporate governance* lainnya yang meliputi ukuran dewan komisaris, aktivitas (pertemuan) dewan komisaris, proporsi anggota independen komite audit, aktivitas (pertemuan) komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor penyebab hasil penelitian belum mampu membuktikan hipotesis penelitian adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kandungan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal belum secara jelas mengatur pedoman pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan di Indonesia. Perundang-undangan tersebut hanya sebatas mengungkapkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tanpa memuat regulasi lebih lanjut atas pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga motif yang mendasari pengungkapan tiap perusahaan berbeda-beda. Perbedaan motif yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan mungkin dapat dijelaskan oleh teori lain yang menyebabkan teori agensi dan teori legitimasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak relevan dalam menjelaskan hipotesis. Hal ini sejalan dengan Chariri (2008) yang mengungkapkan terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di antaranya *decision-usefulness theory*, *economic based theory (positive accounting theory)*, dan *political economy theory (legitimacy dan stakeholder theory)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L. S. & Retrinasari, I. (2007). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis FE Universitas Trisakti*, Jakarta, 9 Juni 2007.
- Arifin. (2005). *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Branco, M. C. & Rodrigues, L. L. (2006). Communication of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks. *Corporate Communications: An International Journal*, 11(3), 232-248.
- Branco, M. C. & Rodrigues, L. L. (2007). Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 12(1).
- Budiartha, K. (2008). Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2000 terhadap Corporate Social Responsibility (CSR).” *Buletin Studi Ekonomi*, 13(2), 210-215.
- Chariri, A. (2008). Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Maksi*, 8(2), 151-169.
- Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI. (2002). *Sustainability Reporting Guidelines. Global Reporting Initiatives*. www.globalreporting.org/guidelines/062002guidelines.asp.
- Guthrie, J. & Ward, L. (2006). Legitimacy Theory: A Story of eporting Social and Environmental Matters within The Australian Food and Beverage Industry. *Working Paper*. University of Sydney.
- Iryanie, E. (2009). Komitmen Stakeholder Perusahaan terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Unpublished Tesis*. Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Komalasari, P. T. (2000). Asimetri Informasi dan Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi III*. Depok. 907-930.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Milne, M.J. (2002). Positive Accounting Theory, Political Costs, and Social Disclosure analysis; a Critical Look. *Critical Perspectives on Accounting*, 13, 369-395.
- Mirfazli, E. (2008). Evaluate Corporate Social Responsibility Disclosure at Annual Report Companies in Multifarious Group of Industry Members of Jakarta Stock Exchange (JSX), Indonesia. *Social Responsibility Journal*, 4(3), 288-406.
- Rahayu, S. I. (2006). Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela terhadap Kualitas Laba. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Roberts, J. (2004). Agency Theory, Ethics and Corporate Governance. *Corporate Governance and Ethics Conference*.

- Said, R., Zainuddin, Y. & Haron, H. (2009). The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212-226.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo. 379-395.
- Solihin, I. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15 ayat (a) dan (b).
- Villiers, C. & Staden, C. J. V. (2006). Can Less Environmental Disclosure Have a Legitimising Effect? Evidence from Africa. *Accounting, Organizations and Society*, 763-781.